



KEPUTUSAN
MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Program Legislasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3.Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
4. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1008).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PROGRAM LEGISLASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Program Legislasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Proleg Kemenumkm Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Proleg Kemenumkm Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk Tahun 2025.
- KETIGA** : Pemrakarsa melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Proleg Kemenumkm Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Sekretaris Kementerian melalui Kepala Biro Organisasi, SDMA dan Hukum.
- KEEMPAT** : Biro Organisasi, SDMA dan Hukum melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Kementerian kepada Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan dlm rangka pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Juni 2025

MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



MAMAN ABDURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
NOMOR 112 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM LEGISLASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL,
MENENGAH TAHUN 2025

PROGRAM LEGISLASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENANGGUNG JAWAB SUBSTANSI
(1)	(2)	(3)
DEPUTI BIDANG KEWIRAUSAHAAN		
1.	Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional	Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha, Deputi Bidang Kewirausahaan
SEKRETARIAT KEMENTERIAN		
2.	Peraturan Menteri UMKM tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Sekretariat Kementerian
3.	Peraturan Menteri UMKM tentang Penyelenggaraan Satu Data	Biro Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Kementerian
4.	Peraturan Menteri UMKM tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian UMKM	Biro Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Kementerian
5.	Peraturan Menteri UMKM tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai	Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum, Sekretariat Kementerian
6.	Peraturan Menteri UMKM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian UMKM	Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum, Sekretariat Kementerian
7.	Peraturan Menteri UMKM tentang Indikator Naik Kelas UMKM	Biro Organisasi, SDMA, dan Hukum, Sekretariat Kementerian

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENANGGUNG JAWAB SUBSTANSI
8.	Peraturan Menteri UMKM tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Peningkatan Kapasitas Usaha UMKM	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian
9.	Peraturan Menteri UMKM tentang Rencana Strategis Kementerian UMKM Tahun 2025-2029	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian
10.	Peraturan Menteri UMKM tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian UMKM	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, Sekretariat Kementerian
11.	Peraturan Menteri UMKM tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Deputi Bidang Usaha Mikro Deputi Bidang Usaha Kecil Deputi Bidang Usaha Menengah
DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO		
12.	Peraturan Menteri UMKM tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Mikro
DEPUTI BIDANG USAHA KECIL		
13.	Peraturan Menteri UMKM tentang Kebijakan Pemberdayaan UMKM pada Infrastruktur Publik dan Tempat Promosi Lainnya	Asisten Deputi Kemitraan dan Rantai Pasok, dan Pemasaran Usaha Kecil, Deputi Bidang Usaha Kecil
DEPUTI BIDANG USAHA MENENGAH		
14.	Peraturan Menteri UMKM tentang Organisasi dan Tata Kerja LLP-KUKM	LLP-KUKM - Deputi Bidang Usaha Menengah
15.	Peraturan Menteri UMKM tentang Verifikasi Pemberian Ijin Prioritas UKM Dalam Pengurusan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Mineral, Logam dan Batubara dengan Cara Prioritas	Deputi Bidang Usaha Menengah
16.	Peraturan Menteri UMKM tentang Pengembangan Ekosistem Kemitraan Bisnis Usaha Menengah Dengan Usaha Mikro Dan Kecil Berbasis Klaster	Deputi Bidang Usaha Menengah

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENANGGUNG JAWAB SUBSTANSI
17.	Peraturan Menteri UMKM tentang Pengalokasian Pengadaan Barang dan Jasa untuk Produk UMKM	Deputi Bidang Usaha Menengah

MENTERI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



MAMAN ABDURRAHMAN